

## ZONASI WILAYAH TENTUKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

# PPKM Mikro, Zona Oranye Hanya Satu Wilayah

**YOGYA (KR)** - Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Yogya selama sepuluh minggu terakhir masih stabil, tidak naik maupun tidak turun. Meski demikian, berdasarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, hanya ada satu wilayah di Kota Yogya yang masuk zona oranye.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan 94,6 persen Rukun Tetangga (RT) menyanggah status zona hijau dan 5,6 persen zona kuning.

"Untuk zona oranye hanya ada satu RT yakni di Baciro. Itu berdasarkan PPKM mikro untuk kasus minggu ini," ujarnya, Selasa (27/4).

Sementara dari pertumbuhan kasus, diakuinya selama 10 minggu terakhir tidak ada kenaikan maupun penurunan. Meski upaya untuk menurunkan kasus sudah digencarkan, namun belum mampu membuahkan hasil sesuai harapan. Hal ini karena kasus mingguan masih dinamis di angka 150 kasus hingga 200 kasus. Kondisi itu terjadi selama sepuluh minggu terakhir.

Heroe mengungkapkan peta zonasi wilayah berdasarkan PPKM

mikro tersebut menjadi penentu lembaga pendidikan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Jika wilayah dengan status zona oranye atau merah maka sekolah yang ada di kawasan tersebut tidak diperkenankan menjalankan belajar tatap muka. "Kuncinya, agar sekolah tatap muka bisa diperluas kuncinya ialah setiap kawasan harus mampu menjaga areanya itu hijau atau kuning. Kalau sampai masuk oranye, sekolah tatap muka dihentikan sementara," imbuhnya.

Meski demikian, selama simulasi atau uji coba yang akan dilaksanakan hari ini sampai 7 Mei mendatang, pembelajaran tatap muka tetap dikolaborasi dengan daring. Sehingga siswa yang tidak hadir di sekolah tetap bisa mengikuti dari rumah melalui aplikasi Zoom. Begitu pula ketika selama simulasi ada per-

kembangan kasus yang menuntut belajar tatap muka di sekolah dihentikan, maka proses penyampaian materi tetap bisa dilakukan melalui Zoom.

Heroe menjelaskan, pemilihan sepuluh sekolah yang terdiri dari lima sekolah jenjang SD, sudah disesuaikan dengan zonasi. Di samping itu mewakili Yogya utara, tengah dan selatan. Namun demikian, usai simulasi tahap pertama, pada pembelajaran tatap muka tahap kedua usai lebaran jumlah sekolah bisa ditambah. Harapannya, kasus tetap terkendali dan saat tahun ajaran baru semua sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka.

Sementara itu rencana kabupaten/kota di DIY untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mendapatkan dukungan dari Pemda DIY. Namun untuk memastikan pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik, Pemda DIY menyarankan agar PTM tersebut bentuknya uji coba terlebih dahulu dan diimbangi dengan penegakkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

"Kami mempersilakan seandainya

pemerintah kota atau kabupaten akan melaksanakan uji coba (percontohan) PTM SD dan SMP seperti yang akan dilakukan Pemkot Yogyakarta. Mengingat kondisi masih seperti sekarang sebaiknya siswa yang mengikuti PTM jangan terlalu banyak. Begitu pula untuk waktu pelaksanaannya sebaiknya diatur misalnya tidak lebih dari dua jam. Tentunya PTM itu dilakukan di sekolah yang penegakkan Prokesnya sudah siap dan penerapannya sudah baik," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, K Baskara Aji di ruang kerjanya, Selasa (27/4).

Menurut Baskara Aji, seandainya ada orangtua yang belum siap dan tidak diperbolehkan anaknya untuk mengikuti PTM, pihaknya meminta kepada sekolah untuk memfasilitasi siswa tersebut dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan model pembelajaran jarak jauh (PJJ). Begitu pula dengan sekolah yang belum siap tidak perlu memaksakan siswanya untuk mengikuti PTM. Karena dalam kondisi sekarang kesehatan dan keselamatan siswa maupun guru harus menjadi prioritas.

(Dhi/Ria)-f

## Dunia Pendidikan Perlu Kehadiran Psikolog



KR-Frans Boedisoekarnanto

**Para pengurus APSI DIY saat silaturahmi yang diterima Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos (kiri).**

**YOGYA (KR)** - Semakin kompleksnya permasalahan dalam dunia pendidikan menjadi keprihatinan tersendiri. Bangku sekolah sering memunculkan kejenuhan bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Kondisi itu tak hanya dialami oleh para siswa saja, namun juga guru merasakannya.

Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia (APSI) berkomitmen untuk mewujudkan sekolah sebagai lingkungan yang sehat bagi peserta didik. Tujuannya tak lain agar para siswa dapat mewujudkan potensi yang dimiliki secara optimal.

"APSI ingin menjadi asosiasi psikolog sekolah di DIY yang andal, dapat dipercaya dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggotanya maupun masyarakat. Kehadiran APSI diharapkan mampu meningkatkan kesehatan mental dan kompetensi bagi peserta didik seluruh jenjang pendidikan," kata Ketua APSI DIY, Nur Widiasmara SPsi MPsi saat silaturahmi di Kantor PT BP *Kedaulatan Rakyat* yang diterima Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos, Selasa (27/4).

Nur Widiasmara menjelaskan, kondisi dunia pendidikan saat ini membutuhkan adanya perantara dari psikolog. Dalam permasalahan tertentu misalnya kesehatan mental, hal itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh seorang guru sehingga memerlukan keterlibatan psikolog.

Ia berharap kehadiran APSI dapat menjadi rujukan masalah-masalah psikologis yang terkait pendidikan di sekolah. Sehingga ke depan ada upaya pencarian solusi terhadap persoalan kesehatan mental bagi seluruh peserta didik.

Dalam kesempatan ini Baskoro Jati Prabowo mengatakan masa pandemi seperti saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan tanah air. Sistem belajar daring tanpa disadari melahirkan permasalahan baru bagi siswa, guru dan juga orangtua.

"Ini menjadi permasalahan bersama yang harus dipecahkan. Jangan sampai cara belajar seperti ini menimbulkan kejenuhan siswa sehingga berpengaruh kepada kesehatan mental," jelasnya. (Van)-f

## 30% LKS DIY Belum Berbadan Hukum

**YOGYA (KR)** - Sekitar 30 persen dari 399 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di DIY belum berbadan hukum. Hal itu menimbulkan permasalahan di lapangan, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Salah satu pelanggaran yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah bahwa sebagian LKS tidak berbadan hukum itu menerima hibah dan bansos langsung dari Kementerian Sosial. "Padahal syarat untuk menerima hibah dari kementerian maupun pemerintah daerah adalah minimal sudah tiga tahun berbadan hukum. Kami pun kelabakan mencari LKS yang menerima hibah itu," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Sri Suprpti, dalam rapat dengan Pansus BA 14 terkait Pengawasan Perda DIY No 11 Tahun 2015

tentang LKS, di DPRD DIY, Selasa (27/4).

Sri berharap dalam Perda ditambahkan pasal yang lebih jelas tentang ketentuan badan hukum itu, sehingga kegiatan LKS di DIY lebih terkontrol. Hal senada diungkapkan akademisi dari STPMD APMD Yogyakarta, Dr Sugiyanto SSos MM, yang mengusulkan agar Perda mencantumkan syarat wajib berbadan hukum bagi LKS yang jangkauan kegiatannya di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Menurut Sugiyanto, salah satu kelemahan LKS yang menjadi sumber masalah adalah tidak jelasnya pembagian kekuasaan organisasi antara pendiri (pembina), pengurus, pengawas, dan pengelola. Tumpang tindih itu menyebabkan banyak permasalahan termasuk problem aset, *moral hazard* (pelanggaran moral) dan lainnya. (Bro)-f

## Larangan Mudik, Terminal Giwangan Tetap Beri Layanan

**YOGYA (KR)** - Pada pemberlakuan larangan mudik 6-17 Mei 2021 mendatang, Terminal Giwangan Yogyakarta tetap akan memberikan layanan atau beroperasi seperti biasa. Terutama melayani kedatangan dan keberangkatan untuk bus reguler dalam kota dan bus antar kota dalam provinsi.

Koordinator Satuan Pengelola Terminal Giwangan Yogyakarta Bakti Zunanta, menjelaskan kendati ada layanan penumpang akan tetapi pengawasan dilakukan secara ketat.

"Pengawasan terhadap armada bus jarak jauh yang menjadi penceramatan kami. Kalau armada dalam kota atau antar kota dalam provinsi tetap kami layani," jelasnya, Selasa (27/4).

Armada jarak jauh yang turut menjadi pemantauan ialah relasi Yogya-Solo. Kendati dari sisi jarak relatif dekat namun armada bus tersebut juga tidak diperbolehkan beroperasi selama masa larangan mudik. Bakti berharap, seluruh armada bus jarak jauh

bisa memahami ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah karena semata-mata ditujukan sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19.

Bakti menambahkan, hingga saat ini pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan bagi penumpang yang datang maupun akan diberangkatkan. Protokol kesehatan tersebut di antaranya pengecekan suhu, memastikan penumpang memakai masker, hingga pembatasan jumlah penumpang dalam satu bus. "Kondisi penumpang di Terminal Giwangan memang cenderung belum kembali normal," imbuhnya.

Selain penerapan protokol kesehatan, kegiatan ramcheck acak untuk bus yang akan diberangkatkan dari Terminal Giwangan pun tetap dilakukan meski jumlah bus yang masuk tidak terlalu banyak. Hal ini karena keselamatan penumpang dan keselamatan perjalanan bus tetap menjadi perhatian petugas. (Dhi)-f



## Narkoba, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

**SEJAK** tahun 2002, Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) menetapkan tanggal 28 April diperingati sebagai Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) se dunia. Sedangkan fokus utama kampanye dari peringatan tersebut yakni meningkatkan kesadaran yang ditujukan pada masalah dan mempromosikan serta menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan. Hal itu untuk membantu mengurangi jumlah kematian yang berhubungan dengan pekerjaan dan cedera.

Menurut Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Yogyakarta, Ari Sutayasmanto S Farm apt, Indonesia memperingati Hari K3 Nasional pada tanggal 12 Januari-12 Februari. Adapun tema Bulan K3 2021 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha".

SDM yang unggul dan berbudaya K3 merupakan salah satu faktor dalam kemajuan semua sektor usaha. Sehingga SDM yang unggul dan berbudaya K3 tentunya tidak bisa dipisahkan dari

kuualitas pribadi manusia yang dibentuk tidak dalam waktu yang singkat namun berproses dalam jangka waktu yang lama. Kualitas pribadi manusia yang unggul itu selain berproses dari diri pribadi masing-masing juga harus dijauhkan dari faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran, salah satunya penyalahgunaan narkoba.

Narkotika, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (\*)-f

## Pemanfaatan Hotel Mutiara Tunggu Kajian

**YOGYA (KR)** - Pemanfaatan Hotel Mutiara di Kawasan Malioboro, masih menunggu kajian dan renovasi. Rencananya, Hotel Mutiara di sisi utara akan dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY untuk display hasil usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan, Detail Engineering Design (DED) berkaitan dengan itu bisa diselesaikan pada tahun 2021. Sedangkan sisi selatan sedang dilakukan kajian oleh Dinas Pariwisata DIY.

"Kalau untuk pemanfaatan Hotel Mutiara sampai saat ini masih menunggu kajian dan renovasi. Mudah-mudahan pada tahun 2021 kajian selesai dan 2022 bisa dilakukan eksekusi untuk menyiapkan fisiknya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di ruang kerjanya, Selasa (27/4).

Diungkapkan, untuk renovasi hotel Mutiara tidak akan dilakukan secara keseluruhan, namun hanya beberapa bagian. Terutama untuk interior kamar akan diubah menjadi interior lapak. Untuk renovasi konstruksi fisiknya juga akan menggunakan Danais. Namun besaran dananya masih dalam penghitungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata.

"Sebetulnya rencana pembelian Hotel Mutiara sudah jauh hari direncanakan. Pemda DIY tengah mencari solusi mengembalikan Malioboro seperti semula dan akan mengusulkannya kepada Unesco karena kawasan tersebut juga menjadi bagian dari sumbu filosofis dan diharapkan menjadi warisan dunia," terangnya. (Ria)-f

## Penghulu Madya KUA Harus Perkuat Moderasi Beragama

**YOGYA (KR)** - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY mengadakan Pelantikan Jabatan Fungsional Penghulu di Ruang Rapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Selasa (27/4). Pelantikan dipimpin Kakanwil Kemenag DIY Drs H Edhi Gunawan MPdI. "Sebagai ASN Kementerian Agama, salah satu tugas utama memperkuat moderasi beragama. Sikap *tawassuth*, toleransi dan bersikap bijak dalam berkehidupan. Diantara yang menjadi tujuh program prioritas Menteri Agama, salah satunya adalah revitalisasi layanan KUA," tandas Kakanwil Edhi Gunawan.

Sebab itulah disampaikan, pihaknya punya harapan besar para penghulu yang baru saja dilantik bisa memberikan kontribusi sesuai dengan jabatan kepenghuluannya. "Segera menempatkan diri pada posisi yang sekarang dan laksanakan tugas sesuai jabatan," tegasnya.

Empat penghulu madya yang dilantik, yakni Gandung Mujiburrahman SAg MA sebagai penghulu madya pada KUA Kecamatan Prambanan Sleman, Drs Sugito Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Kalasan Sleman, Drs Muh Yusuf Penghulu Madya KUA Kecamatan Ponjong Gunungkidul dan Drs H Thoyib Hidayat MSI di KUA Kec Sanden Bantul. (Feb)-f

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA  
Jalan Parangtritis KM 4,5, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

### MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA SATU (D1) TA 2021/ 2022

**PROGRAM STUDI**

- D1 KARAWITAN
- D1 KRIYA KULIT
- D1 TARI

**WAKTU PENDAFTARAN**

- GELOMBANG I : 14 April - 11 Mei 2021

**SYARAT PENDAFTARAN**

- Mempunyai minat/ bakat di bidang Seni Karawitan, Kriya dan, Tari
- KTP DIY
- SMA/ Sederajat
- Usia tidak dibatasi
- Foto copy kartu identitas
- Pas foto 3x4 background merah (4 lembar dan soft copy)
- Foto copy STTB/ Ijazah/ SKHUN yang dilegalisir

**BIAYA KULIAH SEPENUHNYA DITANGGUNG OLEH PEMDA DIY**

Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi [www.aknyogya.ac.id](http://www.aknyogya.ac.id)

## UCY Perkuat Kemitraan dengan PTY

**YOGYA (KR)** - Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (PTY). Kerja sama ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor UCY Ciptasari Prabawanti SPsi MSc PhD dengan Ketua PTY Suropto di Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Selasa (27/4).

Rektor mengatakan, kerja sama ini sangat strategis bagi UCY dalam membangun kemitraan dengan Lembaga Negara, sekaligus implementasi visi UCY sebagai universitas terkemuka, islami, berjihad kebangsaan dan berwawasan global.

"Kerja sama ini mendekatkan ranah teoritis di kampus pada ranah praktis di PTY," terang Rektor kepada wartawan disela acara. Turut mendampingi Rektor, para Wakil Rektor, Dekan dan ketua lembaga di lingkungan UCY.

Menurut Rektor, setelah penandatanganan MoU,

UCY berkomitmen menindaklanjuti kerja sama pada kebijakan Tri Dharma di UCY. Di bidang akademik, UCY dapat menginisiasi program kuliah khusus bagi PTY. Selain itu tugas-tugas kuliah akan diarahkan berbasis kasus dengan output publikasi ilmiah bersama mahasiswa dan dosen. "UCY akan memberikan kesempatan bagi pejabat di lingkungan PTY yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi Dosen Luar Biasa di UCY," katanya.

Suropto menyambut baik kerja sama dengan UCY. Menurutnya, kerja sama ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dari PTY dan UCY merupakan salah satu pengguna pengadilan. Selama di PTY, mahasiswa UCY bisa belajar, melakukan riset atau magang. PTY juga siap mengirimkan hakim tingginya menjadi dosen kehormatannya di UCY.

"Inti dari kerja sama ini bagi kami (PTY) adalah melayani masyarakat," katanya. (Dev)-f

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jalan Margantara No.460 Tanjung Purwokerto  
Telp. (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI**  
Nomor : 032/70 39/2021

Tim pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan melaksanakan Tender Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Parkir Terminal Bulupitu Purwokerto dengan Prakuualifikasi sebagai berikut :

1. **Paket Pekerjaan**  
Pekerjaan : Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Parkir di Terminal Bulupitu Purwokerto Lokasi Kegiatan: Terminal Bulupitu Purwokerto  
HPS : Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)/tahun
2. **Persyaratan Peserta**  
Tender Kerjasama ini terbuka untuk peserta dengan persyaratan sebagai berikut  
a. Memiliki Ijin Usaha Bidang Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan (Off Street Parking) kode 52215 yang masih berlaku.  
b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  
c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2020).  
d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan mempunyai kantor/kantor cabang di Kabupaten Banyumas.  
e. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perparkiran minimal 1 (satu) pekerjaan dibuktikan dengan kontrak kerja sama pengelolaan dengan pemerintah atau swasta (diutamakan mempunyai pengalaman di Kabupaten Banyumas).  
f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.  
g. Memiliki Sertifikat Quality Managemen System ISO : 9001 : 2015  
h. Memiliki Dokumen kerjasama dengan Perbankan untuk pembayaran Elektronik / Cashless  
i. Memiliki saldo rekening di bank minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
3. **Pelaksanaan Tender**  
Pelaksanaan Tender dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Jalan Margantara Nomor 460 Tanjung Purwokerto.  
Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dan / atau dokumen tender dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas/surat kuasa bermaterai Rp.10.000,- dengan menunjukkan ijin usaha dan menyerahkan copynya.
4. **Jadwal Pelaksanaan**  
Jadwal Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Pengelolaan Parkir Terminal Bulupitu Purwokerto adalah sebagai berikut  
a. Pendaftaran dan pengambilan dokumen : 28 April - 7 Mei 2021 pada jam kerja.  
b. Keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan di Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Purwokerto, 28 April 2021  
Tim Pemilihan Mitra Kerjasama  
Ketua  
Ir. NGADIMIN, MP  
NIP. 1962 199803 1008

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.